

# **PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT TERHADAP KETEPATAN WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa  
Efek Indonesia Tahun 2013)**



## **SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**DIORI NOVADE**  
**NIM. 12030111140213**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Diori Novade

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140213

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT  
TERHADAP KETEPATAN WAKTU  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN**

**(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  
2013)**

Dosen Pembimbing : Herry Laksito,S.E, M.Adv, Acc., Akt

Semarang,

Dosen Pembimbing,

Herry Laksito,S.E, M.Adv, Acc., Akt  
NIP. 19660616119920311002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Diori Novade

Nomor Induk Mahasiswa : 12030111140213

Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH EFEKTIVITAS KOMITE AUDIT  
TERHADAP KETEPATAN WAKTU  
PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan  
yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun  
2013)**

**Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 20 Februari 2015**

Tim Penguji :

1. Herry Laksito, S.E., M.Adv. Acc., Akt. (.....)
2. Drs. H. Moh Didik Ardiyanto, S.E, M.Si., Akt. (.....)
3. Dr. Darsono, S.E., MBA., Akt. (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Diori Novade, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya tiru, atau saya yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian saya terbukti melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Februari 2015

Yang membuat pernyataan,

( Diori Novade )  
NIM : 12030111140213

## **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to examine the effect of audit committee effectiveness and timeliness of reporting on non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013. DeZoort index divides the effectiveness of audit committees form the four elements: composition, authority, resources, and diligence. Those elements are examined one by one: the audit committee expertise, the audit committee size and the audit committee meeting.*

*The population in this study are all non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2013. Samples are obtained as many as 260 companies that have the completeness of the data needed by using purposive sampling. The data used is secondary data that is audited annual report on non-financial company in 2013 and contains the date of publication of the financial statements. This study uses logistic regression analysis.*

*The results of this study indicate that the audit committee expertise, the audit committee size and audit committee meetings significantly effect on the timeliness of financial reporting.*

*Keywords: The audit committee effectiveness, audit committee expertise, audit committee size, audit committee meetings, timeliness.*

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Indeks DeZoort membagi efektivitas komite audit mejadi 4 elemen yaitu: komposisi, otoritas, sumber daya, dan kerajinan. Elemen tersebut diteliti satu per satu yaitu keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Sampel yang didapat sebanyak 260 perusahaan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dengan menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu *audited annual report* pada perusahaan non keuangan tahun 2013 dan berisi tanggal publikasi laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi logistik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

**Kata kunci:** Efektivitas komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, pertemuan komite audit, ketepatan waktu.

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Karena itu Aku berkata kepadamu: apa saja yang engkau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu.”*

**Markus 11:24**

*“Setiap orang akan terjebak pada suatu 'kebodohnya masing-masing' yang ia sadari akan menghambat kesuksesan dan kebahagiaannya. Namun ia mempunyai pilihan untuk lepas dari kebodohan itu, hanya jika ia sudah bisa menguasai dirinya sendiri.”*

**D.N.H**

*“Hanya berpikir dan tidak melakukan apa-apa memastikan dirimu menjadi juara terakhir. | Berhenti minder terhadap orang lain, karena kamu hebat dengan caramu. | Banyak orang lebih bodoh darimu, namun jika kamu hanya diam, kamulah yang terbodoh.”*

**-Anonim-**

**Persembahan :**

- 1. Mama, Bapak, bang Roy, Putra, Pidi*
- 2. Orang-orang yang mendukung dan mendoakan.*

## KATA PENGANTAR

Salam sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus atas kasih setia dan penyertaan-Nya yang tak ada hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “**Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)**” dengan lancar, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Herry Laksito, S.E., M.Adv.Acc., Akt selaku Dosen Pembimbing yang sangat berperan penting dalam penulisan skripsi ini karena telah memberikan dukungan dan bimbingan yang sangat baik.
3. Puji Harto, S.E., M.Si., Akt., Ph.D, selaku Dosen Wali penulis. Meskipun sangat jarang berkomunikasi namun sangat berkesan karena beliau mau berbagi ilmu pengetahuannya yang luas.

4. Segenap dosen-dosen FEB dan fakultas lain yang telah memberikan pengajaran, begitu banyak jasa yang telah diberikan, semoga selalu dilimpahi berkat oleh Tuhan.
5. Mama dan Bapak, jasa kalian tak akan pernah bisa terbalas. Semoga saya bisa memberikan potensi terbaik untuk membuat kalian bahagia dan bangga.
6. Deborah Aritonang, S.H telah memberi dukungan yang sangat banyak, sehingga skripsi ini bisa segera selesai. Tuhan yang membalas kebaikanmu.
7. PMK FEB Undip, terima kasih telah menjadi wadah yang menumbuhkan. Semoga bisa terus semakin baik dan memberkati banyak orang.
8. CICO semua part terkhusus bang Rexy, Mindo, Evans, ka Winda. Kalian telah memberikan banyak semangat.
9. Komcil yang belum ada namanya, bang Togi Siagian, Hendra Napits, Ondy Yanuarly, Evans Manurung, dan bang Piter. Terima kasih buat kebersamaannya, meskipun jarang jumpa tapi selalu ada alasan untuk menyapa. Haha
10. Anggia awak Daniel Sinaga dan Tian Silalahi, entah darimana kita kenal, akrab juga enggak, tapi kekonyolan kalian tak terlupakan. PES yok!

11. Pelanggan @Hope\_Pancake, salah satu alasan mengapa harus ngebut menyelesaikan SkripSweet, semoga terus memiliki pengharapan akan hal baik.
12. Juga kepada semua pihak yang belum disebutkan karna keterbatasan penulis yang turut berperan dalam progres diri ini selama perkuliahan, semoga kita tetap bisa saling menyapa dan berjumpa dalam kesuksesan masing-masing. Amin.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Skripsi ini masih jauh dari sempurna sehingga penulis sangat berharap atas kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
ABSTRACT .....	v
ABSTRAK .....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
1.3.1 Tujuan .....	6
1.3.2 Kegunaan .....	6
1.4 Sistematika Penulisan .....	7

BAB II	TELAAH PUSTAKA .....	9
2.1	Landasan Teori .....	9
2.1.1	Teori Agensi .....	9
2.1.2	Teori Kepatuhan .....	11
2.1.3	Laporan Keuangan .....	12
2.1.4	Ketepatan Waktu .....	15
2.1.5	Bapepam .....	17
2.1.6	Komite Audit .....	20
2.1.6.1	Struktur Komite Audit .....	22
2.1.6.2	Tugas Komite Audit .....	24
2.1.6.3	Tanggung Jawab dan Peran Komite Audit .....	24
2.1.6.4	Efektivitas Komite Audit .....	25
2.2	Komponen Indeks Efektivitas Komite Audit .....	26
2.2.1	Keahlian Komite Audit .....	28
2.2.2	Ukuran Komite Audit .....	28
2.2.3	Pertemuan Komite Audit .....	29
2.3	Penelitian Terdahulu .....	30
2.4	Kerangka Pemikiran Teoritis .....	33
2.5	Hipotesis .....	34
BAB III	METODE PENELITIAN .....	38
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	38
3.1.1	Definisi Operasional Variabel .....	38
3.1.2	Variabel Dependen .....	40
3.1.3	Variabel Independen .....	40
3.1.3.1	Keahlian .....	40
3.1.3.2	Ukuran .....	41
3.1.3.3	Pertemuan .....	41

3.1.4 Variabel Kontrol .....	41
3.1.4.1 Ukuran Perusahaan .....	42
3.1.4.2 Jenis Auditor .....	42
3.2 Populasi dan Sampel .....	42
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	43
3.4 Metode Pengumpulan Data .....	43
3.5 Metode Analisis .....	44
3.5.1 Statistik Deskriptif .....	44
3.5.2 Regresi Logistik .....	44
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	49
4.2 Analisis Data .....	52
4.2.1 Pengujian Multikolinearitas .....	53
4.2.2 Analisis Regresi Logistik .....	54
4.2.2.1 Uji Kesesuaian Model .....	54
4.2.2.2 Overall Model Fit .....	56
4.2.2.3 Koefisien Determinasi .....	57
4.2.2.4 Pengujian Hipotesis .....	58
4.3 Interpretasi Hasil .....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>66</b>
5.1 Kesimpulan .....	66

5.2 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian .....	66
5.3 Saran .....	67

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel .....	39
Tabel 4.1 Seleksi Sampel dengan Kriteria .....	49
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif .....	50
Tabel 4.3 Jenis Auditor .....	51
Tabel 4.4 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan .....	52
Tabel 4.5 Pengujian Multikolinearitas .....	53
Tabel 4.6 Hosmer Lameshow Test .....	55
Tabel 4.7 Tabel Klasifikasi .....	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Bersama-Sama .....	57
Tabel 4.9 Hasil Koefisien Determinasi .....	58
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Logistik .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Model Kerangka Pemikiran Teoritis .....	33
--	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran A Sampel Perusahaan dan Tanggal Penyampiannya .....	71
Lampiran B Output SPSS .....	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perusahaan di Indonesia khususnya perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, mempunyai kewajiban yaitu menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia yang memiliki batas akhir penyampaian paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Bapepam, 2003). Pelaporan keuangan menjadi hal yang sangat penting karena manfaatnya bagi berbagai pihak seperti pemegang saham dan calon investor (Ika dan Ghazali, 2012). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (2010) menyebutkan bahwa sebaiknya laporan keuangan dibuat tersedia untuk umum dalam jangka waktu yang wajar dari penutupan keuangan akhir tahun perusahaan, agar kegunaan dari laporan keuangan tidak terganggu.

Seperti yang telah disebutkan di atas, penyampaian laporan paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan setelah periode akhir tahun laporan keuangan, dapat membantu mengurangi terjadinya kebocoran, rumor, dan praktek perdagangan ilegal di bursa saham (Owusu-Ansah, 2000). Tiga bulan atau 90 hari sejak dikeluarkannya laporan keuangan akhir tahun merupakan batas waktu perusahaan dapat dikatakan tepat waktu dalam pelaporan. Istilah *lead time* sendiri merupakan jumlah hari yang berlalu dari pengeluaran laporan keuangan akhir tahun sampai dengan penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit ke Bapepam dan BEI

(Owasu-Ansah dan Laventis, 2006 hal. 277). Jika terdapat penundaan dalam pelaporan, maka laporan keuangan yang dihasilkan dapat kehilangan relevansinya (Hilmi dan Ali, 2008).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan bagi pemegang saham sangat penting karena merupakan sumber utama informasi keuangan perusahaan. Sedangkan bagi investor pelaporan yang tepat waktu dapat mengurangi ketidakpastian yang berkaitan dengan keputusan investasi (Ashton dkk. 1989) dan penyebaran asimetris informasi keuangan antar pemangku kepentingan di pasar modal (Jaggi dan Tsui, 1999). Di sisi lain ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan memang sudah lama dikenal sebagai salah satu atribut kualitatif pelaporan keuangan (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 1980).

Komite audit dalam perusahaan memiliki peranan penting karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Seringkali manajemen tidak melakukan tindakan yang terbaik untuk pemegang saham seperti melakukan pengeluaran berlebih, keputusan investasi yang kurang optimal, serta adanya asimetri informasi. Menurut Ika dan Ghazali (2012) komite audit umumnya dipandang sebagai struktur tata kelola perusahaan secara keseluruhan khususnya dalam hal kualitas audit dan pengawasan pelaporan keuangan.

Fungsi komite audit lainnya adalah mendorong atau memberi saran kepada pihak manajemen untuk menghasilkan informasi keuangan secara tepat waktu. Adapun hubungan komite audit dengan komisaris menurut surat edaran Bapepam No. SE/03/PM/2000 yaitu komite audit bertugas untuk membantu dewan

komisaris dengan memberikan pendapat profesional yang independen untuk meningkatkan kualitas kinerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan (dalam Nuresa, 2013).

Dibentuknya komite audit memiliki beberapa alasan yang secara tidak langsung dapat dilihat dari tugasnya, antara lain adalah meninjau informasi keuangan perusahaan yang akan dirilis, meninjau efektivitas pengendalian internal perusahaan, meninjau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, meninjau dan melaporkan kepada komisaris setiap keluhan terkait perusahaan, serta menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi dari perusahaan (Bapepam, 2004). Di suatu perusahaan yang memiliki komite audit sebenarnya menurut Rahmat dkk. (2008) merupakan bagian dari sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan (dalam Nuresa, 2013).

Komite audit yang efektif tergantung dari karakteristik yang dimilikinya yaitu dengan melihat tingkat independensi anggota komite audit, frekuensi pertemuan yang dilakukan dalam setahun, dan juga dilihat dari ukuran komite audit itu sendiri (Ika dan Ghazali, 2012). Sedangkan menurut DeZort dkk. (2002), komite audit yang efektif terdiri dari 4 elemen dasar yaitu komposisi, kewenangan, sumberdaya, dan tingkat kerajinan. Komite audit yang efektif diharapkan dapat melakukan pemantauan aktif pada proses pelaporan keuangan perusahaan sehingga diakui dengan baik kode tata kelola perusahaan dan pernyataan profesional (Song dan Windram, 2004).

Penelitian sebelumnya oleh Ika dan Ghazali (2012) meneliti tentang Efektivitas Komite Audit dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian terdahulu meneliti tentang perusahaan non keuangan yang terdaftar mulai 2008 di bursa efek sedangkan penelitian ini meneliti perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013. Pada tahun 2008 di US sedang mengalami resesi ekonomi yang berakibat pada resesi ekonomi global termasuk di Indonesia dan perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya (Ika dan Ghazali, 2012). Maka akan diteliti untuk perusahaan tahun 2013 dimana tidak terjadi resesi ekonomi.

Perbedaan lain dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menguji 3 elemen index DeZoort yaitu keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan petemuan komite audit. Dengan pengujian satu per satu dapat memperlihatkan pengaruh tiap-tiap komponen tersebut. Serta dengan tambahan variabel kontrol yaitu ukuran perusahaan dan jenis auditor agar variabel dependen dapat dipengaruhi lebih baik dalam kaitannya oleh variabel independen yaitu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Telah banyak diuraikan di atas bagaimana pentingnya penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu sangat berpengaruh terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di dalamnya. Oleh karena itu, laporan keuangan sebaiknya dibuat tersedia untuk umum dalam jangka waktu yang wajar dari

penutupan keuangan akhir tahun perusahaan agar kegunaan dari laporan tidak terganggu (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia, 2010).

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus memiliki komite audit (Bapepam, 2004) termasuk perusahaan non keuangan yang terdaftar. Komite audit nantinya akan membantu menjembatani perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Komite audit sendiri memiliki tugas meninjau informasi keuangan perusahaan yang akan dirilis, meninjau efektivitas pengendalian internal perusahaan, meninjau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, meninjau, dan melaporkan kepada komisaris setiap keluhan terkait perusahaan publik, menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan (Bapepam, 2004).

Berdasarkan uraian di atas masalah yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah keahlian komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan non keuangan?
2. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan non keuangan?
3. Apakah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan non keuangan?

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Sesuai rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan non keuangan.

#### **1.3.2 Kegunaan**

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di BEI

Membantu perusahaan non keuangan untuk meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dengan menganalisis faktor-faktor dominan dalam elemen efektivitas komite audit.

2. Bagi Investor

Dapat memberikan informasi tentang efektivitas komite audit yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan perusahaan non keuangan sehingga bisa dijadikan pertimbangan tersendiri dalam mengambil keputusan berinvestasi.

3. Bagi Penelitian Mendatang

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi penelitian mendatang dalam menganalisis peran elemen-elemen efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.

## **1.4 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dimana antar bab memiliki tingkat keterkaitan yang sangat erat. Penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pertama dari skripsi adalah pendahuluan. Pada bagian ini dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Telaah pustaka berisi landasan teori dan bahasan hasil-hasil penelitian kerangka pemikiran dan hipotesis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi deskripsi tentang bagaimana penelitian akan dilaksanakan secara operasional. Metode yang digunakan meliputi Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis.

#### BAB IV HASIL DAN ANALISIS

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi objek penelitian, analisis kualitatif dan/atau kuantitatif, interpretasi hasil, dan argumentasi terhadap hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir penulisan skripsi yang harus memuat simpulan, keterbatasan, dan saran.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)**

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah hubungan kontrak kerja (*nexus of contract*) antara *principal* dengan *agent* dimana *principal* adalah pemilik atau pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajer atau pihak yang mengelola perusahaan. Sumber daya perusahaan yang diperlukan untuk kegiatan operasi perusahaan disediakan *principal* sedangkan manajemen berfungsi untuk mengelola sumber daya perusahaan untuk dimaksimalkan dalam rangka menyejahterakan perusahaan dan orang yang memegang kepentingan. Adanya perbedaan kepentingan dan resiko antara *principal* dan *agent* sering menjadi penyebab konflik keagenan. Keinginan *principal* adalah untuk memaksimalkan *return* atau deviden, keinginan *agent* untuk mendapatkan kompensasi yang terbaik sehingga dapat menyebabkan *agent* tidak sesuai dalam mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan *principal*, apalagi jika *agent* merupakan pihak oportunistis (Jensen dan Meckling, 1976).

Ada dua macam *agency problems* menurut Arrow (dalam Purwati, 2006) yaitu:

1. *Moral hazard*, adalah suatu keadaan saat pemegang saham sebagai *principal* tidak dapat melakukan pengamatan secara detail apakah manajemen sebagai *agent* sudah membuat keputusan secara tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. *Adverse selection*, adalah suatu keadaan saat seorang *agent* membuat pengamatan yang belum dilakukan oleh *principal* dimana hasil pengamatan tersebut dipakai untuk mengambil keputusan. *Principal* dalam hal ini sulit memastikan apakah informasi hasil pengamatan *agent* telah dipakai dengan baik untuk membuat keputusan yang baik sesuai kepentingan *principal*. Menurut Hendriksen dan Breda (2000), teori keagenan memberikan tiang pokok bagi peranan akuntansi dalam menyediakan informasi, hal ini diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, sehingga hal ini memberikan akuntansi sebagai nilai umpan balik selain nilai prediktifnya.

Asimetri informasi juga sebagai implikasi dari teori keagenan, disaat kedua belah pihak tidak mengetahui semua keadaan dan sebagai akibatnya ada konsekuensi yang tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak tersebut. Sehingga laporan keuangan yang disampaikan oleh perusahaan dengan segera dan tepat waktu dapat mengurangi asimetri informasi tersebut. Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan sebagai “agency relationship as a contract under which one or more person (*the principals*) engage another person (*the agent*) to perform some service on their behalf which involves delegating some decision

making authority to the *agent*". Jadi, teori agensi digunakan untuk membantu komite audit untuk memahami konflik kepentingan yang dapat muncul antara pemilik dan manajemen. Pemilik selaku investor bekerjasama dan menandatangani kontrak kerja dengan manajemen perusahaan untuk menginvestasikan dana mereka.

### **2.1.2 Teori Kepatuhan**

Ilmu-ilmu sosial khususnya dibidang psikologis telah meneliti teori kepatuhan dan sosiologi khususnya yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Hukum cenderung dipatuhi oleh individu jika mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka (Susilowati dalam Shaleh, 2004). Laporan keuangan perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal agar perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat pada waktunya. Tahun 1996 Bapepam juga mengeluarkan Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: 80/PM/1996 tentang kewajiban bagi setiap emiten dan perusahaan publik untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan perusahaan dan laporan audit independennya kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan. Kemudian diperketat dengan dikeluarkannya Kep-Bapepam Nomor X.K.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan harus menyertakan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim dan disampaikan kepada Bapepam selambat-

lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

### **2.1.3 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah salah satu jenis laporan yang wajib dibuat oleh perusahaan *go public*. Selain karena untuk memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan ke Bapepam dan Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan juga berguna untuk kelangsungan perusahaan dimana informasi yang terdapat dalam laporan keuangan adalah informasi yang dibutuhkan oleh pemegang saham dan calon investor dalam mengambil keputusan investasi (Ika dan Ghazali, 2012).

Laporan keuangan merupakan sarana utama untuk mengkomunikasikan pihak luar perusahaan tentang informasi keuangan, laporan ini berisi sejarah kuantitatif perusahaan dalam satuan uang (Kieso, 2010). Sedangkan Budi Raharja (2001) menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban yang telah dibuat oleh manajer atau pimpinan perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya oleh pemilik, pemerintah atau kreditor, dan pihak pihak yang mempunyai kepentingan.

Komunikasi melalui laporan keuangan diharapkan mampu memberi kejelasan atas kinerja manajemen. Oleh karena itu laporan keuangan yang dihasilkan haruslah berkualitas. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2009) Nomor 1 menyebutkan bahwa kualitas laporan keuangan mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan mempunyai kualitas penting yaitu kemudahannya untuk dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai dianggap memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk terus mempelajari informasi.

2. Relevan

Pengambilan keputusan bisa dilakukan jika informasi yang disediakan masih relevan. Suatu informasi dapat dikatakan memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai. Peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan dapat dievaluasi dengan informasi yang masih memiliki tingkat relevansi yang baik.

3. Andal

Karakteristik kualitas andal pada informasi keuangan terjadi jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, serta dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian jujur (*faithfull representation*) yang seharusnya disajikan atau yang disajikan sesuai harapan.

4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus bisa dibandingkan antar periode oleh pemakai untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Selain itu pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan secara relatif.

Dalam memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat kepada investor mengenai kondisi keuangan emiten atau perusahaan publik atau dalam rangka mengikuti perkembangan pasar modal global, laporan yang disampaikan kepada Bapepam terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan (neraca),
- b. laporan laba rugi komprehensif,
- c. laporan perubahan ekuitas,
- d. laporan perubahan arus kas,
- e. laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif, jika emiten menerapkan suatu kebijakan secara retrospektif membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau reklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya, dan
- f. catatan atas laporan keuangan.

Proses yang panjang dalam membuat laporan keuangan tentunya memiliki tujuan yang jelas. Adapun tujuan pelaporan keuangan menurut *Financial Accounting Standards Board* (Hendriksen dan Van Breda, 2000, hal.136) sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan harus menyediakan informasi yang berguna bagi investor, bagi kreditor, dan bagi pemakai lain yang sekarang dan yang potensial mengambil keputusan rasional untuk investasi, kredit, dan serupa.
- b. Laporan keuangan harus menyediakan informasi guna membantu investor dan kreditor dan pemakai lain yang sekarang dan yang potensial dalam menentukan jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas prospektif

dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penarikan, atau jatuh tempo surat berharga atau pinjaman.

- c. Pelaporan keuangan harus menyediakan mengenai informasi sumber daya ekonomi dari satuan usaha, tuntutan terhadap sumber daya tersebut (kewajiban satuan usaha itu untuk mentransfer sumber daya ke satuan usaha lain dan modal pemilik), dan pengaruh transaksi, kejadian, dan situasi yang mengubah sumber daya danuntutannya pada sumber daya tersebut.

#### **2.1.4 Ketepatan Waktu**

Laporan keuangan dalam penyajiannya sebaiknya memiliki suatu interval waktu, untuk menjelaskan perubahan dalam perusahaan yang mungkin mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Hendriksen, 1992). Sedangkan IAI (2007) menyatakan bahwa jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Laporan keuangan yang terlambat dilaporkan tidak lagi mampu menggambarkan keadaan keuangan perusahaan dan tidak bisa dijadikan acuan dalam mengambil keputusan.

Chamber dan Penman (1984) mendefinisikan ketepatan waktu kedalam dua cara: pertama, ketepatan waktu didefinisikan sebagai keterlambatan waktu penyampaian laporan keuangan dari tanggal laporan keuangan sampai tanggal melaporkan. Kedua, ketepatan waktu ditentukan dengan ketepatan waktu pelaporan relatif atas tanggal pelaporan yang diharapkan. Untuk melihat ketepatan

waktu, biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*). Dyer dan McHugh (1975) dalam penelitiannya menggunakan tiga kriteria keterlambatan:

1. *Preliminary lag*, yaitu interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai penerimaan laporan akhir *preliminary* oleh bursa;
2. *Auditor's report lag*, yaitu jumlah hari antara laporan keuangan sampai tanggal laporan auditor ditandatangani;
3. *Total lag*, adalah interval jumlah hari antara tanggal laporan keuangan sampai tanggal penerimaan laporan dipublikasikan oleh bursa.

Biasanya suatu penelitian melihat keterlambatan pelaporan (*lag*) untuk melihat ketepatan waktu. Ketentuan waktu penyampaian laporan keuangan tahunan telah diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor X.K.2 yang menjelaskan tentang penyampaian laporan keuangan perusahaan dan laporan keuangan tahunan yang harus disertai dengan pendapat lazim dari auditor independennya yang disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan perusahaan.

Keterlambatan pelaporan bukan hal yang bisa dianggap sebagai hal kecil oleh perusahaan. Terkait dengan keterlambatan penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bapepam, dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:

- a. Emiten yang Pernyataan Pendaftaran telah menjadi efektif, dikenakan sanksi denda Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas setiap hari keterlambatan

penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

b. Perusahaan Publik yang terlambat menyampaikan Pernyataan Pendaftarannya, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

c. Direktur atau Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, atau setiap pihak yang memiliki sekurang-kurangnya 5% (lima perseratus) saham Emiten atau Perusahaan Publik, dikenakan sanksi denda Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas setiap hari keterlambatan penyampaian laporan dimaksud dengan ketentuan bahwa jumlah keseluruhan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### **2.1.5 Bapepam**

Pasar Modal di Indonesia didirikan pada tahun 1976. Menurut Kepres No.52/1976, Bapepam bertugas:

1. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal apakah telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan sehat.
2. Menyelenggarakan Bursa Pasar Modal yang efektif dan efisien.
3. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal.

Keluarnya Kepres 53 tentang Pasar Modal dan SK Menkeu No.1548 tahun 1990 menghapus fungsi Bapepam sebagai penyelenggara pasar modal, sehingga lembaga ini dapat memfokuskan diri pada pengawasan pembinaan pasar modal. Posisi Bapepam dalam struktur pasar modal Indonesia yaitu berada di bawah Menteri Keuangan Republik Indonesia dan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pasar modal. Dalam melaksanakan fungsinya, Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan ijin, persetujuan dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal, memproses pendaftaran dalam rangka penawaran umum, menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan, dan melakukan penegakkan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan pelaporan keuangan perusahaan, kewenangan Bapepam sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU Pasar Modal meliputi:

- 1) Menetapkan persyaratan dan tata cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan, menunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran.
- 2) Mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap perundang-undangan atau peraturan pelaksanaannya.
- 3) Mewajibkan setiap pihak untuk :
  - a. Menghentikan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kejadian di pasar modal;

- b. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi dimaksud;
- c. Melakukan pemeriksaan atau menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan terhadap:
  - i. Setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam.
  - ii. Pihak yang dipersyaratkan memiliki ijin usaha, ijin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan Undang-undang;
- d. Mengumumkan hasil pemeriksaan;
- e. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada Bursa Efek atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal;
- f. Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal keadaan darurat;
- g. Memeriksa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan, dan Penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud;
- h. Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang Pasar Modal;

i. Berdasarkan UU Pasar Modal tahun 1995 pasal 105, Bapepam mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh ijin persetujuan atau pendaftaran dari Bapepam berupa:

i. Peringatan tertulis,

ii. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu,

iii. Pembatasan kegiatan usaha,

iv. Pembekuan kegiatan usaha,

v. Pencabutan ijin usaha,

vi. Pembatalan persetujuan dan

vii. Pembatalan pendaftaran.

#### **2.1.6 Komite Audit**

Definisi komite audit sesuai dengan keputusan Bursa Efek Indonesia melalui Kep.Direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 menyatakan komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris, yang bertugas membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan perusahaan. Pada tahun 2000 Bapepam mengeluarkan surat edaran SE/03/PM/2000 mengenai pembentukan komite audit. Pada tahun selanjutnya Ketua BEI mengeluarkan Kep. Direksi BEI No. 339 tahun

2001 mengenai peraturan pencatatan efek di bursa yang mencakup komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, keterbukaan, dan standar laporan keuangan per sektor.

Di Indonesia melihat betapa pentingnya keberadaan komite audit yang efektif dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan perusahaan, maka serangkaian ketentuan mengenai komite audit telah diterbitkan, antara lain sebagai berikut:

- a. Pedoman Good Corporate Governance (Maret, 2001) yang menganjurkan semua perusahaan di Indonesia memiliki komite audit;
- b. Surat edaran Bapepam No. SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki Komite Audit, sebagaimana diperbaharui dengan keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- c. Kep. 339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit;
- d. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-103/MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit;
- e. Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 yang mengharuskan semua BUMN mempunyai komite audit.

### **2.1.6.1 Struktur Komite Audit**

Di Indonesia struktur komite audit diatur dalam Kep. Men. 117/2002 untuk perusahaan BUMN dan untuk perusahaan publik diatur dalam Keputusan BEJ dan Peraturan Bapepam yang relevan. Ketentuan mengenai struktur komite audit menurut keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit adalah sebagai berikut:

1. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham.
2. Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen bertindak sebagai ketua komite audit. Dalam hal ini komisaris independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.

Persyaratan keanggotaan komite audit sesuai keputusan ketua Bapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Peraturan Nomor IX.1.5: Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2. Salah seorang dari anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;
4. Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
5. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan atau non audit pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan Nomor VIII A.2 tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal;
6. Bukan merupakan karyawan kunci emiten atau perusahaan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir sebelum diangkat oleh komisaris;
7. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota komite audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada pihak lain;
8. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan emiten atau perusahaan publik, komisaris, direksi atau pemegang saham utama emiten atau perusahaan publik;
9. Tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha emiten atau perusahaan publik.

### **2.1.6.2 Tugas Komite Audit**

Dibentuknya komite audit memiliki beberapa alasan yang secara tidak langsung dapat dilihat dari tugasnya, antara lain adalah meninjau informasi keuangan perusahaan yang akan dirilis, meninjau efektivitas pengendalian internal perusahaan, meninjau kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan, meninjau dan melaporkan kepada komisaris setiap keluhan terkait perusahaan, serta menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi dari perusahaan (Bapepam, 2004). Di suatu perusahaan yang memiliki komite audit sebenarnya menurut Rahmat dkk. (2008) merupakan bagian dari sumbangan strategi kepemimpinan perusahaan untuk keberhasilan upaya perubahan arah perusahaan (dalam Nuresa, 2013).

Komite audit dalam perusahaan memiliki peranan penting. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pihak manajemen dan pihak pemegang saham. Seringkali manajemen tidak melakukan tindakan yang terbaik untuk pemegang saham seperti melakukan pengeluaran berlebih, keputusan investasi yang kurang optimal, serta adanya asimetri informasi. Menurut Ika dan Ghazali (2012) komite audit umumnya dipandang sebagai struktur tata kelola perusahaan secara keseluruhan khususnya dalam hal kualitas audit dan pengawasan pelaporan keuangan.

### **2.1.6.3 Tanggung Jawab dan Peran Komite Audit**

Komite audit pada prinsipnya memiliki tugas pokok dalam membantu dewan komisaris melakukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Menurut

Peraturan Bapepam-LK No/IX/1/5, tugas dan tanggungjawab komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan dalam mematuhi peraturan perundang-undangan di pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor eksternal;
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten;
6. Menjaga kerahasiaan data, dokumen, dan informasi perusahaan.

#### **2.1.6.4 Efektivitas Komite Audit**

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai, efektivitas lebih berorientasi kepada output (Sedarmayanti, 2001) sehingga dapat disimpulkan target perusahaan adalah mendapatkan keuntungan yang maksimal tanpa adanya kesulitan keuangan yang dialami oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu ukuran komite audit yang sesuai dengan aturan Bursa Efek Indonesia, adanya anggota independen dalam komite audit, frekuensi pertemuan yang sesuai dengan situasi dan kondisi perusahaan

(minimal 3 kali pertemuan), dan pengetahuan keuangan dari salah satu atau lebih anggota komite audit merupakan penentu dari keefektivitasan suatu komite audit. Price Waterhouse (dalam Ataina 2000) merekomendasikan bahwa komite audit secara periodik harus mengevaluasi kinerjanya.

Ataina (2000) berpendapat bahwa evaluasi komite audit sebaiknya dilakukan oleh akuntan publik yang independen yang bukan akuntan publik perusahaan. Pendapat ini didukung oleh Sommer (1991) dalam Ataina (2000) yang menyatakan bahwa auditor mempunyai posisi yang strategis untuk mengevaluasi kinerja komite audit. Hal ini disebabkan karena auditor merupakan pihak yang sering bergaul dengan berbagai komite audit suatu perusahaan. Selain itu, akuntan publik juga menerapkan sistem *peerreview* (evaluasi kinerja suatu Kantor Akuntan Publik (KAP) oleh KAP lain) dalam melakukan evaluasi kinerja sehingga hasil evaluasi lebih bersifat kredibel. Komite audit juga harus mereview hasil evaluasi tersebut dengan seluruh anggota dewan komisaris (Ataina 2000).

## **2.2 Komponen Indeks Efektivitas Komite Audit**

Dalam penelitian ini efektivitas komite dilihat berdasarkan seperangkat index efektivitas komite audit yang dikembangkan oleh DeZoort, dkk. (2002) yang memberikan penjelasan mengenai komite audit secara empiris adalah “*An effective audit committee has qualified members with the authority and resources to protect stakeholder interests by ensuring reliable financial reporting, internal controls, and risk management through diligent oversight efforts*”. Berdasarkan

dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa tujuan utama pembentukan komite audit yaitu melindungi kepentingan pemegang saham minoritas melalui penunjukan anggotanya yang mempunyai kompetensi dengan segala kewenangan dan sumber daya untuk memberikan pengawasan yang rutin dan terarah. Atas dasar pengertian tersebut terdapat empat kriteria dalam mengukur efektivitas komite audit dimana setiap kriteria tersebut dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas komite audit, kriteria tersebut yaitu:

#### 1. Susunan Komite Audit (*Composition*)

Susunan komite audit mengacu pada komposisi yang memungkinkan komite audit untuk melakukan evaluasi yang tepat untuk kepentingan pemegang saham. Contohnya: independensi, kapabilitas, latar belakang pendidikan, pengalaman, dll.

#### 2. Sumber daya Komite Audit (*Resource*)

Sumber daya mengacu pada jumlah anggota komite audit yang efektif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan optimal. Contohnya jumlah anggota komite audit.

#### 3. Kerajinan Komite Audit (*Diligence*)

Kerajinan mengacu pada tingkat kesediaan anggota komite audit dalam berkerja sama untuk melakukan tugasnya seperti memberikan pertanyaan, mengejar jawaban ketika berhadapan dengan manajer, auditor internal, auditor eksternal, dan pihak lain yang berhubungan. Contohnya pertemuan komite audit.

### **2.2.1 Keahlian Komite Audit**

Keperluan untuk memiliki minimal satu orang ahli keuangan dalam komite audit diasumsikan akan bisa meningkatkan efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas pengawasan (Bapepam, 2004). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Farber (2005) bahwa *non fraud firm* cenderung memiliki lebih banyak ahli keuangan.

Kecurangan pelaporan keuangan berhubungan negatif dengan keahlian keuangan pada komite audit. Hal itu membuktikan bahwa keberadaan seseorang yang ahli di bidang akuntansi maupun manajemen keuangan dapat memberikan perbedaan besar pada efektivitas kinerja komite audit (dalam Abbott, dkk. 2004)

### **2.2.2 Ukuran Komite Audit**

Komite audit harus memiliki anggota yang memadai untuk melaksanakan tugasnya agar efektif (DeZoort, dkk. 2002). Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan, serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (KNKG, 2002). Selain itu Blue Ribbon Committee (BRC, 1999) dan Sarbanes-Oxley Act (2002), Bapepam (2004) menyatakan bahwa bahwa komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang.

### 2.2.3 Pertemuan Komite Audit

Keahlian, independensi, kewenangan, dan sumber daya, tidak akan meningkatkan efektivitas kecuali komite audit dapat mempunyai peran yang aktif (Ika dan Ghazali, 2012). Bapepam (2004) tidak menyatakan seberapa sering komite audit harus bertemu, namun IDX (2004) menetapkan bahwa komite audit harus mengisi laporan atas aktivitas pada BOC secara periodik minimal sekali dalam tiga bulan. Jadi dapat dikatakan bahwa setidaknya komite audit harus melaksanakan minimal empat kali pertemuan, oleh karena itu penelitian sekarang menggunakan persyaratan pertemuan atas audit minimal 4 kali dalam setahun untuk menilai efektivitas komite audit.

Hasil rapat komite audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh semua anggota komite audit. Ketua komite audit bertanggung jawab atas agenda dan bahan-bahan pendukung yang diperlukan serta wajib melaporkan aktivitas pertemuan komite audit kepada dewan komisaris. Apabila komite audit menemukan hal-hal yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan perusahaan, komite audit wajib menyampaikannya kepada dewan komisaris selambat-lambatnya sepuluh hari kerja.

Laporan yang dibuat dan disampaikan komite audit kepada komisaris utama adalah:

1. Laporan triwulanan mengenai tugas yang dilaksanakan dan realisasi program kerja dalam triwulan bersangkutan;
2. Laporan tahunan pelaksanaan kegiatan komite audit;

### 3. Laporan atas setiap penugasan khusus yang diberikan oleh dewan komisaris.

Dalam laporan komite audit kepada dewan komisaris, komite audit memberikan kesimpulan dari diskusi dengan auditor eksternal tentang temuan mereka yang berhubungan dengan peninjauan tengah tahun dan laporan keuangan tahunan, rekomendasi atas pengangkatan auditor eksternal dan setiap masalah pengunduran diri, penggantian dan pemberhentian perikatannya, kesimpulan tentang nilai fungsi audit internal dan tanggapan atas penemuan audit internal, serta kesimpulan atas kinerja sistem kontrol internal. Frekuensi dan isi pertemuan tergantung pada tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada komite audit. Jumlah pertemuan dapat ditentukan berdasarkan ukuran perusahaan dan besarnya tugas yang diberikan kepada komite audit. Namun, pada umumnya komite audit bersidang tiga sampai empat kali dalam setahun yaitu sebelum laporan keuangan dikeluarkan, sesudah pelaksanaan audit dan sesudah laporan keuangan dikeluarkan, serta sebelum RUPS tahunan (Ataina 2000).

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

Selain menggunakan dukungan landasan teori, agar penelitian ini dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis, maka dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan pertimbangan. Beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya:

Purwati (2006) melakukan penelitian dengan menggunakan sampel 140 perusahaan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menyatakan bahwa independensi anggota komite audit, ketua komite audit, keahlian keuangan anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan keanggotaan komite audit, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Ika dan Ghazali (2012) meneliti tentang efektivitas komite audit yang berdasarkan dari index DeZoort terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dengan menggunakan sampel 211 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas komite dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ika dan Ghazali (2012) yang menguji pengaruh dari efektivitas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008. Penelitian ini juga menggunakan variabel-variabel independen efektivitas komite audit berdasarkan index DeZoort yaitu *composition, authority, resources, dan diligence*. Pada tahun 2008 di US sedang mengalami resesi ekonomi yang berakibat pada resesi ekonomi global termasuk perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia (Ika dan Ghazali, 2012).

Tabel 2.1

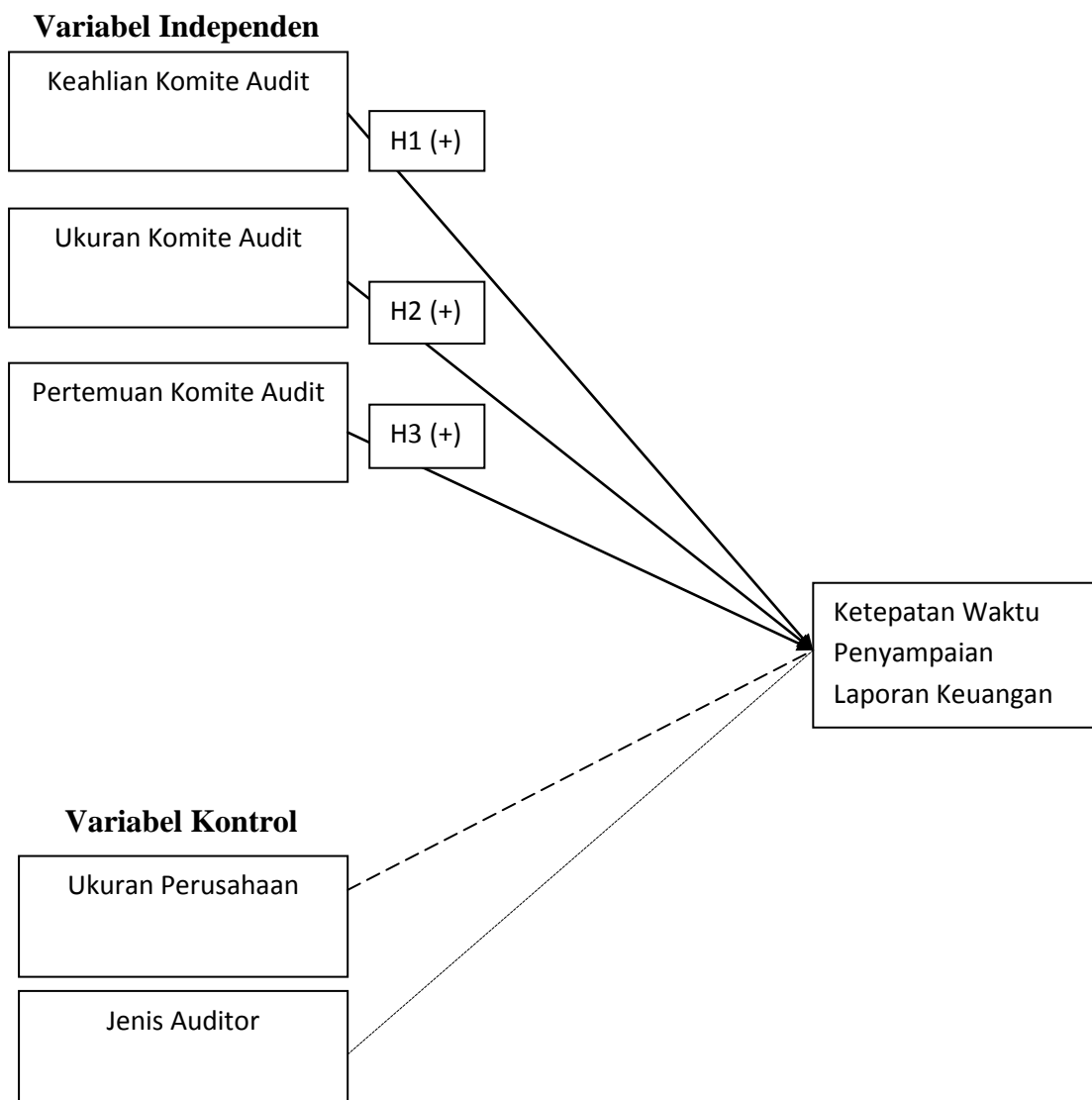
## Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Analisa Statistik	Hasil Penelitian
1	Purwati (2006)	Keanggotaan komite audit (x) Independensi anggota komite audit (x) Proporsi komisaris independen (x) Ketua komite audit (x) Kompetensi komite audit (x) Ketepatan waktu pelaporan keuangan (y)	Analisis regresi logistik	Menemukan bahwa independensi komite audit, ketua komite audit, dan kompetensi komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan keanggotaan komite audit dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan
2	Ika dan Ghazali (2012)	Efektivitas komite audit (x) Kondisi Keuangan (c) Ukuran perusahaan (c) Ukuran KAP (c) Tipe Industri (c) Ketepatan waktu pelaporan keuangan (y)	Cross-sectional regression with ordinary least squares (OLS)	Menemukan bahwa efektivitas komite audit, ukuran perusahaan, dan tipe industri berpengaruh positif secara signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sedangkan ukuran perusahaan dan ukuran KAP tidak berpengaruh secara signifikan.

## 2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1

### Model Kerangka Pemikiran Teoritis



## 2.5 Hipotesis

### 2.5.1 Keahlian Komite Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013

Keperluan untuk memiliki minimal satu orang ahli keuangan dalam komite audit diasumsikan akan bisa meningkatkan efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas pengawasan (Bapepam, 2004). Seperti penelitian yang dilakukan oleh Farber (2005) bahwa *non fraud firm* cenderung memiliki lebih banyak ahli keuangan.

Kecurangan pelaporan keuangan berhubungan negatif dengan keahlian keuangan pada komite audit. Hal itu membuktikan bahwa keberadaan seseorang yang ahli di bidang akuntansi maupun manajemen keuangan dapat memberikan perbedaan besar pada efektivitas kinerja komite audit (dalam Abbott, dkk. 2004)

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H1: Keahlian komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

### 2.5.2 Ukuran Komite Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013

Terdapat temuan yang bervariasi dalam kaitannya ukuran komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan, Farber (2005) menemukan bahwa perbedaan ukuran komite audit antara *fraud* dan *non fraud firm* tidak signifikan secara statistik. Purwati (2006) menemukan bahwa ukuran komite audit tidak mempunyai asosiasi yang signifikan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan, dan juga terhadap manajemen laba (xie, dkk. 2003 ; Bedard, dkk. 2004), namun ditemukan signifikan dalam menjelaskan kemungkinan atas manajemen laba triwulan (Yang dan Krishan, 2005), *earning restatement* (lin, dkk. 2006), *qualified audit opinion in annual report* ( Pucheta dan Fuentes, 2007), dan *audit report lag* (Nor, dkk 2010). Dalam rangka membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawab.

Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 (tiga) orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2002). Dengan demikian ukuran komite audit yang memadai disimpulkan secara umum dapat menghindari terjadinya masalah masalah keuangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan khususnya dalam pencapaian ketepatan waktu laporan keuangan. Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H2: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

### **2.5.3 Pertemuan Komite Audit dan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Non Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013**

Pertemuan atau rapat komite audit berfungsi sebagai media untuk melaksanakan berbagai perbaikan atau evaluasi yang dibutuhkan, yang termasuk memastikan kualitas laporan keuangan. Frekuensi dan isi pertemuan komite audit dipengaruhi oleh berbagai hal salah satunya yaitu tugas, tanggung jawab, dan ukuran perusahaan. Berdasarkan keputusan ketua Bapepam Nomor Kep-24/PM/2004 Tahun 2004 dalam peraturan Nomor IX.I.5 disebutkan bahwa komite audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat dewan komisaris yang ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Beberapa penelitian sudah menguji hubungan antara pertemuan komite audit dan kualitas pelaporan keuangan, yaitu Collier dan Gregory (1999) menyebutkan bahwa frekuensi pertemuan komite audit yang lebih sering memberikan mekanisme pengawasan dan pemantauan kegiatan keuangan yang lebih efektif, meliputi persiapan dan pelaporan informasi keuangan perusahaan.

Farber (2005) menemukan bahwa *fraud firm* mempunyai pertemuan komite audit yang kurang dari *non fraud firm* pada tahun *preceeding fraud* dinyatakan, namun dalam tiga tahun kedepan, perusahaan *fraud* melaksanakan pertemuan komite audit lebih sering dari perusahaan tanpa *fraud*. Perusahaan

dengan pertemuan komite audit setidaknya kurang dari empat kali setahun cenderung memberikan pernyataan kembali laporan keuangan (Abbott, dkk. 2004), disamping itu Nor, dkk (2010) menemukan bahwa pertemuan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap *audit report lag*. Namun Lin, dkk. (2006) menemukan bahwa pertemuan komite audit mempunyai hubungan yang tidak signifikan dengan *earnings restatement*. Dari penjelasan di atas, pertemuan komite audit secara umum disimpulkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui fungsi pegawasannya dan pemberian sarannya yang khususnya diharapkan dapat meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**H3: Pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel**

Pada penelitian ini menggunakan variabel-variabel yang terdiri dari variabel terikat (*dependent variable*), variabel bebas (*independent variable*) dan variabel kontrol (*control variable*). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan, variabel bebas dalam penelitian ini adalah keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit, sedangkan variabel kontrol dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan jenis auditor.

##### **3.1.1 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel disini terdiri dari variabel, dimensi, indikator dan skala pengukuran. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan definisi operasional variabel.

Tabel 3.1

## Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Ketepatan waktu pelaporan keuangan (y)	Bursa Efek Indonesia (BEI)	Variabel <i>dummy</i> , 0 (nol) untuk kategori perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan 1 (satu) untuk kategori perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.	Skala Nominal
Keahlian komite audit (x)	Laporan tahunan perusahaan	Jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian keuangan dibagi jumlah seluruh anggota komite audit.	Skala Rasio
Ukuran komite audit (x)	Ukuran komite audit (resource)	Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.	Skala Interval
Pertemuan komite audit (x)	Keaktifan komite audit (diligence)	Jumlah rapat komite audit dalam 1 tahun.	Skala Interval
Ukuran perusahaan (Size)	Laporan posisi keuangan	Total aset.	Skala Interval
Jenis Auditor	Laporan tahunan perusahaan	Variabel <i>dummy</i> , 0 (nol) untuk kategori perusahaan menggunakan KAP <i>non Big Four</i> dan 1 (satu) untuk kategori perusahaan yang menggunakan KAP <i>Big Four</i> .	Skala Nominal

### 3.1.2 Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yaitu tanggal penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dimana Bapepam menetapkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 90 hari setelah tahun buku berakhir. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan variabel *dummy*. Perusahaan dikategorikan tepat waktu jika laporan keuangan disampaikan sebelum tanggal 1 April, sedangkan perusahaan dikategorikan tidak tepat waktu jika perusahaan menyampaikan laporan keuangan setelah tanggal 1 April, kategori 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan kategori 1 (satu) untuk perusahaan tidak tepat waktu.

### 3.1.3 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit.

#### 3.1.3.1 Keahlian Komite Audit

Keahlian komite audit adalah keahlian atau kompetensi dibidang keuangan yang harus dimiliki oleh minimal satu orang dalam sebuah komite audit. Keahlian komite audit ini berguna untuk membantu komite audit melakukan fungsi pengawasan terhadap pihak manajemen. Keahlian komite audit diukur dengan

cara menghitung jumlah anggota komite audit yang memiliki kompetensi keuangan dibanding dengan jumlah seluruh anggota komite audit.

### **3.1.3.2 Ukuran Komite Audit**

Ukuran komite audit yaitu jumlah keanggotaan komite audit dalam suatu perusahaan. Dimana Bapepam (2004) menyebutkan bahwa komite audit setidaknya terdiri dari tiga orang. Ukuran komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah anggota komite audit yang dibentuk perusahaan.

### **3.1.3.3 Pertemuan Komite Audit**

Pertemuan komite audit yaitu rapat atau pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam waktu satu tahun, pedoman FCGI (2002) menyatakan bahwa komite audit harus mengadakan pertemuan paling sedikit setiap tiga bulan atau minimal empat kali pertemuan dalam satu tahun. Pertemuan komite audit dalam penelitian ini diukur dari jumlah pertemuan atau rapat yang dilaksanakan oleh komite audit dalam satu tahun.

### **3.1.4 Variabel Kontrol**

Penelitian ini menggunakan lima variabel kontrol untuk mengendalikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya kondisi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Variabel kontrol yang digunakan adalah ukuran perusahaan dan jenis auditor.

#### **3.1.4.1 Ukuran Perusahaan**

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara. Penentuan ukuran perusahaan pada penelitian ini didasarkan kepada total aset perusahaan (Machfoedz, 1994). Dalam memperoleh hasil total aset yang valid maka langkah yang dilakukan adalah transformasi data mentah menjadi data yang merupakan nilai logaritma dari data itu sendiri ( $\ln$  total aset).

#### **3.1.4.2 Jenis Auditor**

Jenis auditor yang berbeda memungkinkan hasil ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan. Dalam penelitian ini perusahaan dibedakan menjadi perusahaan yang diaudit oleh *Big Four* atau *non Big Four*.

### **3.2 Populasi dan Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013. Sampel yang digunakan adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penentuan sampel ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu sampel yang memiliki karakteristik kesesuaian sampel dengan pemilihan kriteria sampel yang sudah ditentukan.

Kriteria tersebut adalah :

- a. Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013
- b. Perusahaan yang memiliki laporan komite audit yang lengkap.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya atau melalui pihak lain. Data berupa laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen perusahaan masing-masing perusahaan publik tahun 2013. Data diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia di Univeritas Diponegoro, akses langsung website Bursa Efek Indonesia ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)).

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengolah literatur, buku, artikel, jurnal, hasil penelitian terdahulu maupun media tertulis lainnya yang berhubungan dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini. Selain itu, menggunakan metode studi dokumentasi yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini serta data mengenai tanggal penyampaian laporan keuangan perusahaan.

### **3.5 Metode Analisis**

#### **3.5.1 Statistik Deskriptif**

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai rata-rata (*mean*), standard deviasi, maksimum, dan minimum untuk menggambarkan setiap variabel penelitian.

#### **3.5.2 Regresi Logistik**

Untuk menguji seluruh hipotesis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan regresi logistik (*regression logistic*) yang variabel bebasnya merupakan kombinasi antara variabel kontinyu (data metrik) dan kategorial (data non metrik). Campuran skala pada variabel bebas tersebut menyebabkan asumsi *multivariate normal distribution* tidak dapat terpenuhi, dengan demikian bentuk fungsinya menjadi logistik. Teknik analisis ini tidak memerlukan uji normalitas dan uji asumsi klasik pada variabel bebasnya (Ghozali, 2005). Model logistik digunakan untuk melihat hubungan kemungkinan perusahaan akan mengalami kondisi kesulitan keuangan pada suatu periode dengan karakteristik komite audit pada periode yang sama. Variabel terikat yang digunakan merupakan variabel *binary*, yaitu apakah perusahaan tersebut menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu atau tidak. Variabel bebas yang digunakan dalam model ini adalah keahlian komite audit, ukuran komite audit, pertemuan komite audit. Perhitungan statistik dan pengujian hipotesis dengan analisis regresi logistik

dalam penelitian ini dilakukan dengan bantuan program komputer SPSS.

Persamaan yang dibentuk dengan menggunakan regresi logistik adalah berikut :

Model persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :

$$\text{Ln} \frac{\text{TL}}{1 - \text{TL}} = \beta_0 - \beta_1 \text{ACEXP} + \beta_2 \text{ACSIZE} + \beta_3 \text{ACMEET} + \beta_4 \text{SIZE} + \beta_5 \text{AUDIT} + \varepsilon_i$$

Dimana :

$\beta_0$	Konstanta
TIMELINESS	Nilai 1 (satu) untuk perusahaan yang tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan.
ACSIZE	Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan.
ACMEET	Jumlah pertemuan komite audit dalam waktu 1 tahun.
SIZE	Ukuran perusahaan = Ln total aset.
AUDIT	Variabel <i>dummy</i> , 0 (nol) untuk kategori perusahaan menggunakan KAP <i>non Big Four</i> dan 1 (satu) untuk kategori perusahaan yang menggunakan KAP <i>Big Four</i> .

1. Uji Kelayakan Model (*Goodness of Fit Test*)

Menurut Ghozali (2005), *goodness of fit test* dapat dilakukan dengan memperhatikan output dari *Hosmer and Lemeshow's Goodness of fit test*, dengan hipotesis:  $H_0$  : Model yang dihipotesiskan fit dengan data  $H_A$  : Model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* sama dengan atau kurang dari 0,05 maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Sehingga uji kelayakan model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi nilai observasinya. Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow* lebih besar dari 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya.

2. Uji Kelayakan Keseluruhan Model (*Overall Fit Model Test*)

Dalam menilai overall fit model, dapat dilakukan dengan beberapa cara.

Diantaranya:

a. Chi Square ( $X^2$ )

Tes statistik *Chi Square*( $X^2$ ) digunakan berdasarkan pada fungsi *likelihood* pada estimasi model regresi. *Likelihood* (L) dari model adalah probabilitas bahwa model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. L ditransformasikan menjadi  $-2\log L$  untuk menguji hipotesis nol dan alternatif. Penggunaan nilai untuk keseluruhan model terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai  $-2 \log likelihood$  awal (hasil *block number* 0) dengan nilai  $-2 \log likelihood$  hasil *block number* 1. Dengan kata lain, nilai *chi square* didapat dari nilai  $-2 \log L_1 - 2$

$\log L_0$ . Apabila terjadi penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.

b. *Cox and Snell's R Square dan Nagelkerke's R square*

*Cox dan Snell's R Square* merupakan ukuran yang mencoba meniru ukuran *R square* pada *multiple regression* yang didasarkan pada teknik estimasi *likelihood* dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit diinterpretasikan. Untuk mendapatkan koefisien determinasi yang dapat diinterpretasikan seperti nilai  $R^2$  pada *multiple regression*, maka digunakan *Nagelkerke R square* merupakan modifikasi dari koefisien *Cox and Snell R square* untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 sampai 1. Hal ini dilakukan dengan cara membagi nilai *Cox and Snell R square* dengan nilai maksimumnya. Nilai *Nagelkerke R square* menilai variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan dengan variabilitas variabel independen (Ghozali, 2005).

c. Tabel Klasifikasi 2x2

Tabel klasifikasi 2x2 menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*). Pada kolom merupakan dua nilai prediksi dari variabel dependen dalam hal ini perusahaan tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan (1) dan perusahaan tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan (0), sedangkan pada baris menunjukkan menunjukkan nilai observasi sesungguhnya dari variabel dependen. Pada model sempurna, maka semua kasus akan berada pada diagonal dengan ketepatan peramalan 100% (Ghozali, 2005).

3. Pengujian Signifikansi Koefisien Regresi

Pengujian koefisien regresi dilakukan untuk menguji seberapa jauh semua variabel independen dan variabel kontrol yang dimasukkan dalam model, mempunyai pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan yang terindikasi kesulitan keuangan. Koefisien regresi logistik dapat ditentukan dengan menggunakan *p-value* (*probability value*).

- a. Tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) yang digunakan sebesar 5% (0,05).
- b. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis didasarkan pada signifikansi *p-value*. Jika *p-value* (signifikan)  $> \alpha$ , maka hipotesis alternatif ditolak. Sebaliknya jika *p-value*  $< \alpha$ , maka hipotesis alternatif diterima.